

Koordinasi Pendidikan Masyarakat Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kana Mapande Kota Palu

*Ruli Firmansyah¹, Nasir Mangngasing², Sussanti¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

²Universitas Tadulako

Email : Corresponding Author*

Kata Kunci :

1. Koordinasi
2. Pendidikan
3. Kesatuan Tindakan
4. Komunikasi
5. Pembagian Kerja

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi yang dilakukan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kana Mapande dan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, yang merupakan suatu penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang diteliti secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik (menyeluruh dan mendalam) dan rumit. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, yang merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu serta Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori yang dikemukakan oleh Hasibuan (2011), yang mana menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi koordinasi antara lain : kesatuan tindakan, komunikasi dan pembagian kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dan PKBM Kana Mapande berjalan dengan baik. Pada bagian kesatuan tindakan, adanya koordinasi dari segi penggunaan kurikulum serta mekanisme pembiayaan PKBM dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 serta kedua lembaga ini memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Pada bagian komunikasi, terlihat bahwa adanya kesatuan tindakan terkait penggunaan kurikulum, adanya bantuan pembiayaan yang diberikan. Sedangkan pada bagian pembagian kerja dalam koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dan PKBM Kana Mapande berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya kesatuan tindakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan

Keyword :

1. **Coordination**
2. **Education**
3. **Unity of Action**
4. **Comunication**
5. **Division of Work**

Abstract : *This study aims to determine the coordination carried out by the Community Learning Activity Center (PKBM) Kana Mapande and the Education and Culture Office of Palu City in improving the quality of public education. The basis of the research used in this research is qualitative, which is a study that seeks to build the views of the people being studied in detail and formed with words, holistic (thorough and deep) and complex pictures. While the type of research used is descriptive, which is a study that is used to describe or analyze a research result but is not used to make broader conclusions. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. The informants in this study are Plt. Head of the Education and Culture Office of Palu City, Head of PAUD and DIKMAS Division of Education and Culture Office of Palu City, Head of Curriculum and Assessment Section of PAUD and DIKMAS of Palu City Education and Culture Office and Head of Section for Students and Character Development of PAUD and DIKMAS City Education and Culture Office Hammer. Meanwhile, the data analysis used in this research is data reduction, data presentation and conclusion drawing.*

The theory used in this study is the theory proposed by Hasibuan (2011), which explains that the factors that influence coordination include: unity of action, communication and division of labor.

The results showed that the coordination between the Education and Culture Office of Palu City and PKBM Kana Mapande went well. In the unitary action section, there is coordination in terms of the use of the curriculum and the PKBM financing mechanism with reference to Permendikbud Number 13 of 2020 and these two institutions have the same goal in improving the quality of public education. In the communication section, it can be seen that there is a unity of action related to the use of the curriculum, the existence of financial assistance provided. While the division of labor in coordination between the Education and Culture Office of Palu City and PKBM Kana Mapande is going well, this can be seen from the unity of action in improving the quality of education..

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak bagi seluruh masyarakat serta menjadi salah satu aspek untuk membangun sumber daya manusia yang baik, hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 Ayat C Poin (1) Undang - Undang Dasar 1945. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan. akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pernyataan yang tertuang pada kedua regulasi tersebut memberi gambaran bahwa pendidikan sangat penting bagi masyarakat dan hal tersebut juga menjadi salah satu fokus utama pemerintah yang mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Pendidikan yang berkualitas menjadi suatu tuntutan serta kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan yang mana tidak dapat ditawar, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Maka dari itu pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Namun, hal tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, terlihat bahwa jumlah siswa putus sekolah di 34 Provinsi pada tahun ajaran 2019 - 2020 yaitu sebanyak 59.443 siswa putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD), sebanyak 38.464 siswa putus sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sebanyak 59.259 siswa putus sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA / SMK) (Statistik Pendidikan, 2021).

Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yaitu dengan mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sendiri merupakan tempat dimana masyarakat dapat mengikuti kegiatan belajar berbasis pendidikan non-formal yang mana memberikan fasilitas bagi masyarakat agar dapat mengikuti ujian kesetaraan melalui program paket A, paket B dan paket C. Pendidikan non-formal sendiri merupakan aliran pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang (Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menjelaskan bahwa untuk mengembangkan PKBM dalam rangka suksesnya tujuan pendidikan nasional menjadi tanggung jawab semua pihak, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota maupun masyarakat luas (PKBM Himata, 2020). Penjelasan ini memberikan gambaran bahwa koordinasi antara pemerintah dan PKBM diperlukan agar terciptanya kualitas pendidikan yang baik bagi masyarakat.

Koordinasi sendiri merupakan suatu pergerakan usaha yang teratur untuk menciptakan jumlah, waktu, serta arah pelaksanaan yang tepat agar menghasilkan tindakan terpadu serta harmoni yang menuju ke arah sasaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Handoko (2003) bahwa koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan dalam unit-unit yang terpisah (departemen atau area fungsional) dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Koordinasi bukanlah persoalan politik dan administrasi yang

sederhana, namun juga terkait berbagai permasalahan dalam sektor publik, yang mana memungkinkan terciptanya kerjasama dengan berbagai alasan dalam administrasi dan politik (Bouckaert, Peters & Verhoest, 2010).

Koordinasi antara lembaga pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan pemerintah (atau dalam hal ini yaitu dinas pendidikan) perlu dilakukan agar meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, khususnya di Sulawesi Tengah. Hal ini menjadi perhatian penulis karena berdasarkan data yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (Statistik Pendidikan, 2021), terlihat bahwa jumlah siswa putus sekolah di Sulawesi Tengah pada tahun ajaran 2019 - 2020 yaitu sebanyak 3.448 siswa (SD, SMP, SMA dan SMK). Untuk itu koordinasi perlu dilakukan agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dan juga lembaga PKBM serta dinas pendidikan memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, sehingga kedua lembaga tersebut diharapkan dapat melakukan koordinasi.

LANDASAN TEORI

1. Koordinasi

Koordinasi adalah suatu proses sinkronisasi yang teratur dalam upaya menyediakan jumlah, waktu yang tepat untuk mengarahkan pelaksanaan yang menghasilkan keselarasan dan tindakan terpadu untuk mencapai tujuan lain (Terry dalam Sukarna, 2011). Lebih lanjut Brech (dalam Hasibuan, 2014) menjelaskan bahwa koordinasi adalah menyeimbangkan dan menggerakkan tim dengan menetapkan lokasi yang cocok untuk aktivitas kerja masing-masing dan menjaga agar aktivitas yang dilakukan selaras di antara para anggota itu sendiri. Sedangkan menurut Stoner (dalam Sugandha, 2011), koordinasi adalah suatu proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Hal ini menggambarkan bahwa koordinasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengikatan kesepakatan bersama sehingga di satu pihak semua kegiatan atau unsur diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dan di lain pihak keberhasilan suatu kegiatan tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain. (Ndraha, 2003).

Pelaksanaan koordinasi pada pelayanan publik perlu memperhatikan beberapa aspek (Yusup, 2013), antara lain :

1. Koordinasi harus dilakukan secara terpusat, agar ada unsur pengendalian agar setiap bagian (unit kerja) tidak bergerak sendiri-sendiri yang sifatnya sudah ada pada masing-masing bagian.
2. Koordinasi harus terintegrasi, integrasi kerja menunjukkan keadaan saling melengkapi dan memberi.
3. Koordinasi harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatan yang saling berhubungan, selalu terjadi, selalu diupayakan, dan selalu menekankan adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya.
4. Koordinasi harus menggunakan pendekatan multi institusi yaitu dengan meningkatkan komunikasi, pertukaran informasi yang relevan untuk menghindari tumpang tindih tugas satu sama lain, dan menghindari ambiguitas dalam pelaksanaan program.

Sedangkan menurut Tripathi dan Reddy (dalam Moekijat, 2006) bahwa ada sembilan syarat yang diperlukan untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu :

1. Hubungan Langsung: Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung
2. Peluang awal: Koordinasi dapat dicapai dengan lebih mudah pada tahap awal perencanaan dan pembuatan kebijakan.
3. Kontinuitas: Koordinasi merupakan proses yang berkesinambungan dan harus berlangsung setiap saat mulai dari tahap perencanaan.
4. Dinamisme: Koordinasi harus terus diubah dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.
5. Tujuan yang jelas: Tujuan yang jelas penting untuk mencapai koordinasi yang efektif.
6. Organisasi sederhana: Struktur organisasi yang sederhana memfasilitasi koordinasi yang efektif.
7. Rumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas: Kewenangan yang jelas tidak hanya mengurangi konflik antara karyawan yang berbeda, tetapi juga membantu mereka bekerja dengan tujuan yang seragam.

8. Komunikasi yang efektif Komunikasi yang efektif merupakan salah satu syarat terjadinya koordinasi yang baik.
9. Kepemimpinan pengawasan yang efektif: Kepemimpinan yang efektif memastikan koordinasi kegiatan masyarakat, baik di tingkat perencanaan maupun di tingkat pelaksanaan.

Koordinasi sendiri dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan ruang lingkup dan arah jalurnya (Sugandha, 2011), yang mana pembagian tersebut meliputi :

1. Ruang Lingkup Koordinasi

- Koordinasi Internal : koordinasi antar pejabat atau antar unit di dalam suatu organisasi.
- Koordinasi Eksternal : koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi.

2. Arah Jalur Koordinasi

- Koordinasi Horizontal: Koordinasi antar pejabat atau antar unit yang memiliki tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi, dan antara pejabat dari organisasi yang sederajat atau antar organisasi yang setingkat.
- Koordinasi Vertikal: Koordinasi antara pejabat dan unit tingkat bawah oleh atasan atau unit tingkat atas langsung, serta cabang organisasi oleh organisasi induk.
- Koordinasi Diagonal: Koordinasi antar pejabat atau unit dengan fungsi yang berbeda dan tingkat hierarki yang berbeda.
- Koordinasi Fungsional: Koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi berdasarkan kesamaan fungsi, atau karena koordinator memiliki fungsi tertentu..

Koordinasi sendiri memiliki ciri – ciri yang terkandung di dalamnya. Menurut Handyaningrat (2011), ciri – ciri yang terdapat pada koordinasi yaitu :

1. Tanggung jawab: Tanggung jawab untuk koordinasi itu sendiri terletak pada seorang pemimpin. Oleh karena itu, koordinasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pimpinan. Dikatakan bahwa pemimpin berhasil, karena dia telah berkoordinasi dengan baik

2. Koordinasi adalah usaha kooperatif: Koordinasi adalah usaha kooperatif karena kerjasama merupakan syarat mutlak untuk koordinasi yang sebaik-baiknya.
3. Koordinasi adalah proses yang berkesinambungan: suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
4. Pengaturan Usaha Kelompok Reguler: Koordinasi adalah suatu konsep yang diterapkan di dalam kelompok, bukan pada usaha individu tetapi pada sejumlah individu yang bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
5. Konsep Unity of Action adalah Inti dari Koordinasi: Pada bagian ini, pemimpin harus mengatur upaya dan tindakan dari setiap aktivitas individu sehingga ada keharmonisan dalam kelompok tempat mereka bekerja bersama.
6. Koordinasi Tujuan Adalah Tujuan Bersama: Kesatuan upaya atau tindakan meminta kesadaran atau pemahaman semua individu untuk berpartisipasi dalam melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok tempat mereka bekerja.

Lebih lanjut Winardi (2012) menjelaskan bahwa ciri - ciri koordinasi yaitu :

1. Pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab atas koordinasi yang baik, dibutuhkan kerjasama dari setiap komponen organisasi.
2. Adanya proses yang berkesinambungan, karena koordinasi merupakan pekerjaan pimpinan yang berkesinambungan dan harus dikembangkan agar tujuan dapat tercapai dengan baik.
3. Koordinasi adalah suatu konsep yang ditetapkan dalam kelompok, bukan pada usaha individu, sejumlah individu yang bekerja sama untuk menghasilkan usaha kelompok yang benar-benar dilakukan dengan baik akan menghasilkan kerja organisasi secara keseluruhan juga.
4. Konsep kesatuan tindakan. Pemimpin harus mampu mengatur usaha dari setiap aktivitas individu agar terjadi keselarasan dalam mencapai hasil.

Koordinasi sendiri dapat diukur dengan beberapa teknik. Menurut Ndraha (2003), teknik pengukuran koordinasi yaitu :

1. Informasi, komunikasi dan teknologi informasi.

2. Kesadaran pentingnya koordinasi; berkoordinasi; koordinasi built-in (memasukkan koordinasi dalam setiap job atau task)
3. Kompetensi partisipan, kalender pemerintahan. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah peserta forum koordinasi selayaknya para pejabat yang berkompeten dalam mengambil keputusan. Adapun untuk menjamin kehadiran pejabat demikian, tentunya hal ini perlunya menetapkan kalender pemerintahan (koordinasi) yang harus ditaati sepenuhnya dari atas ke bawah.
4. Kesepakatan dan Komitmen. Terkait ini diartikan bahwa kesepakatan serta komitmen harus diagendakan oleh setiap pihak secara institusional.
5. Penetapan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi.
6. Insentif koordinasi, yaitu berupa sanksi bagi pihak yang ingkar atau tidak menaati kesepakatan bersama. Adapun sanksi tersebut diberikan oleh pihak atasan yang terkait.
7. Feedback, diartikan sebagai masukan-balik kedalam proses koordinasi selanjutnya.

2. Syarat Koordinasi

Syarat koordinasi mengacu pada hal - hal yang mendukung proses pelaksanaan koordinasi agar berjalan dengan baik. Adapun syarat yang harus terpenuhi dalam proses koordinasi (Hasibuan, 2001; Tery dalam Handayaniingrat, 2002) antara lain :

1. *Sense of cooperation* (perasaan untuk bekerja sama) ini harus dilihat dari sudut bagian-bagian perbagian bidang pekerjaan, bukan orang perorangan.
2. *Rivaly*, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan.
3. *Team Spirit*, satu sama lain tiap bagian harus saling menghargai.
4. *Esprit de corp*, artinya bagian-bagian yang diikuti sertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat.
5. Sedangkan menurut Tripathi dan Reddy (dalam Moekijat, 2006), syarat yang diperlukan untuk mencapai suatu koordinasi yang efektif yaitu : 1). Hubungan langsung; 2). Kesempatan awal; 3). Kontinuitas; 4). Dinamisme; 5). Tujuan yang jelas; 6). Organisasi

yang sederhana; 7). Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas; 8). Komunikasi yang efektif, serta; 9). Kepemimpinan dan supervise yang efektif.

3. Fungsi Koordinasi

Menurut Handayani (1989) fungsi koordinasi antara lain :

1. Sebagai salah satu fungsi manajemen, selain fungsi perencanaan, penyiapan pegawai, pengembangan kerja, motivasi dan pengawasan. Dengan kata lain, koordinasi merupakan fungsi organik dari kepemimpinan.
2. Memastikan kelancaran mekanisme prosedur kerja berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dijamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari sesedikit mungkin perselisihan yang timbul antar sesama komponen organisasi dan mengupayakan kerjasama yang semaksimal mungkin antar komponen terkait.
3. Sebagai upaya untuk mengarahkan dan mempersatukan kegiatan yang mengandung makna keterpaduan yang dilakukan secara serasi dan serentak/sinkronisasi segala tindakan yang dilakukan oleh organisasi, sehingga organisasi tersebut bergerak sebagai satu kesatuan kesatuan agar mampu melaksanakan semua tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
4. Sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu dan ditentukan oleh kualitas upaya koordinasi yang dilakukan. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan upaya yang perlu dilakukan secara terus menerus karena bukan hanya masalah teknis tetapi tergantung pada sikap, tindakan, dan langkah para pemegang fungsi organik pimpinan.
5. Menciptakan jaringan hubungan kerja atau komunikasi. Jaringan hubungan kerja berupa saluran hubungan kerja yang membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi. Hubungan kerja ini perlu dijaga agar tidak terjadi berbagai kendala yang akan membawa organisasi pada situasi yang tidak berfungsi sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien.

6. Sebagai upaya untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah, dan sikap para pejabat pengambil keputusan dan pelaksana secara terpadu. Pada organisasi yang besar dan kompleks, pertumbuhan organisasi akan menyebabkan penambahan beban kerja, penambahan fungsi yang harus dijalankan dan penambahan jabatan yang perlu dikoordinasikan.
7. Untuk penataan spesialisasi dalam berbagai tugas keragaman. Karena munculnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

4. Tujuan Koordinasi

Setiap proses koordinasi yang dilakukan, pasti memiliki tujuan tertentu. Menurut Hasibuan (2001), koordinasi bertujuan untuk :

1. Mengarahkan dan menyatukan segala tindakan dan pemikiran menuju pencapaian tujuan perusahaan.
2. Mengarahkan keahlian khusus ke arah tujuan perusahaan.
3. Menghindari kekosongan dan pekerjaan yang tumpang tindih.
4. Hindari kekacauan dan penyimpangan dari target tugas.
5. Mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan 6M menuju tujuan organisasi atau perusahaan.
6. Hindari tindakan tumpang tindih tujuan perusahaan.

Lebih lanjut Hasibuan (2006) menambahkan bahwa tujuan koordinasi yaitu :

1. Untuk mencegah kebingungan, pertengkaran, dan kembaran atau lowongan pekerjaan.
2. Agar manusia dan pekerjaannya selaras dan terarah pada pencapaian tujuan perusahaan.
3. Agar sarana dan prasarana digunakan untuk mencapai tujuan.
4. Agar seluruh unsur manajemen dan kerja setiap individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
5. Agar semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi ke dalam tujuan yang diinginkan.

Sedangkan Handoko (2003) memberikan pendapat bahwa koordinasi sendiri bertujuan untuk :

1. Menghindari rasa terlepas satu sama lain, antar unit organisasi atau antar pejabat dalam organisasi.
2. Menghindari pendapat atau perasaan bahwa unit organisasi atau pejabat adalah yang terpenting.
3. Menghindari kemungkinan terjadinya konflik antar bagian dalam organisasi.
4. Menghindari terjadinya lowongan pekerjaan dalam suatu kegiatan di dalam organisasi

5. Faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi

Menurut Hasibuan (2011), faktor yang mempengaruhi koordinasi antara lain :

1. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan merupakan kewajiban pimpinan untuk mendapatkan koordinasi yang baik dengan menetapkan jadwal waktu, artinya unit usaha dapat berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

2. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan suatu jangkauan yang sangat ditentukan oleh adanya komunikasi.

3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah pembagian tugas dan pekerjaan sehingga setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan serangkaian kegiatan yang terbatas. Jadi pembagian kerja menyebabkan peningkatan efektivitas yang dramatis, karena tidak ada yang secara fisik mampu melakukan semua aktivitas dalam tugas yang paling kompleks dan tidak ada juga yang memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melakukan berbagai tugas.

4. Disiplin

Disiplin mengacu pada suatu sikap dan perilaku, baik individu maupun kelompok untuk tunduk dan patuh pada aturan suatu organisasi

6. Pendidikan

Pendidikan adalah untuk mempersiapkan manusia dalam memecahkan problem kehidupan di masa kini maupun di masa yang akan datang (Djumali dkk, 2014). Sedangkan menurut Notoadmodjo (dalam Heldrianto, 2013), pendidikan formal dalam suatu organisasi merupakan suatu proses pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Lebih lanjut Sutrisno (2016) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan aktivitas yang bertautan, dan meliputi berbagai unsur yang berhubungan erat antara unsur satu dengan unsur yang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pendidikan mengacu pada kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan akan teori, menambah keterampilan serta proses pengembangan kemampuan. Selain diketahui juga bahwa terdapat klasifikasi pendidikan, yaitu pendidikan formal dan non-formal. Dalam Pasal 13 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Pada proses belajar mengajar terdapat kurikulum yang dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pasal 36 Ayat 1, 2 dan Ayat 3 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan penjelasan bahwa :

1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
3. Kurikulum disusun menurut jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :
 - Meningkatkan keimanan dan ketakwaan
 - Meningkatkan akhlak mulia
 - Meningkatkan potensi, kecerdasan, dan minat siswa
 - Keanekaragaman potensi daerah dan lingkungan
 - Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
 - Tuntutan dunia kerja

- Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- Agama
- Dinamika perkembangan global
- Persatuan bangsa dan nilai-nilai kebangsaan

Sedangkan pada Pasal 37 Ayat 1 dan 2 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan lebih lanjut tentang kurikulum yang digunakan berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu :

1. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :

- Pendidikan agama
- Pendidikan kewarganegaraan
- Bahasa
- Matematika
- Ilmu pengetahuan alam
- Ilmu pengetahuan sosial
- Seni dan budaya
- Pendidikan jasmani dan olahraga
- Keterampilan / kejuruan
- Muatan lokal.

2. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :

- Pendidikan agama
- Pendidikan kewarganegaraan
- Bahasa.

METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang berusaha membangun pandangan orang-orang yang diteliti secara rinci dan dibentuk dengan kata-kata, holistik (menyeluruh dan mendalam) dan gambaran yang kompleks. (Tohirin, 2013). Menurut Afifuddin

(2009), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek alam, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif. hasil menekankan makna daripada generalisasi. Lebih lanjut Moleong (2010) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dipahami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu waktu. konteks khusus yang bersifat alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Sedangkan deskriptif sendiri merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2011). Lebih lanjut Widodo & Mukhtar (2000) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif ialah metode riset yang dipergunakan dalam memperjelas tentang gejala sosial melalui berbagai variabel yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Penelitian deskriptif tidak membutuhkan hipotesis, karena pengujian serta penulisan akan dilakukan setelah berada di lokasi penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat khususnya untuk mengetahui bagaimana koordinasi antara lembaga pusat kegiatan pelajar masyarakat dan dinas pendidikan kota palu untuk dijadikan sebagai obyek penelitian

PEMBAHASAN

Terry (dalam sukarna, 2011) memberikan penjelasan bahwa koordinasi merupakan suatu proses sinkronisasi tertib dalam upaya memberikan jumlah, waktu yang tepat mengarahkan pelaksanaan yang menghasilkan keselarasan dan tindakan terpadu untuk mencapai tujuan lain. Menyeimbangkan dan menggerakkan tim dengan menetapkan lokasi yang sesuai untuk aktivitas kerja masing-masing dan menjaga agar aktivitas tersebut dilakukan secara harmonis di antara para anggota itu sendiri merupakan suatu koordinasi (Brech dalam Hasibuan, 2014).

Koordinasi menjadi hal yang sangat penting, khususnya dalam bidang pendidikan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat koordinasi Pendidikan Masyarakat Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kana Mapande Kota Palu dengan menggunakan tiga dari empat faktor yang

mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2011), yaitu : kesatuan tindakan, komunikasi dan pembagian kerja.

1. Kesatuan Tindakan

Jika koordinasi dianggap sebagai cara untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya suatu tujuan (Hasibuan, 2001), maka dapat dijelaskan bahwa kesatuan tindakan mengacu pada kewajiban pimpinan untuk mendapatkan koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu yang berarti unit bisnis dapat berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan (Hasibuan, 2011). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui bahwa adanya kesatuan tindakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dan PKBM Kana Mapande dari segi penggunaan kurikulum. Selain itu, Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan menjadi landasan bagi kedua pihak untuk berkoordinasi terkait anggaran pendidikan. Kedua lembaga ini memiliki *Sense of cooperation* (Hasibuan, 2001; Tery dalam Handyaningrat, 2002) dikarenakan koordinasi yang terjalin atas dasar pembagian pekerjaan. Kesatuan tindakan juga mengacu pada penetapan kesepakatan. Penetapan kesepakatan sendiri merupakan cara yang dilakukan oleh pihak yang akan berkoordinasi (Ndraha, 2003).

Selain itu, diketahui juga bahwa terdapat kesatuan tindakan antara PKBM Kana Mapande dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Hal tersebut terlihat dari adanya koordinasi dari segi penggunaan kurikulum serta mekanisme pembiayaan PKBM dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Serta PKBM Kana Mapande memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Handyaningrat (2011), bahwa tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, di mana suatu unit bisnis atau tindakan meminta kesadaran atau pemahaman semua individu untuk berpartisipasi dalam melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok tempat mereka bekerja.

2. Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu hal yang menentukan suatu koordinasi dapat berjalan. Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik (Tripathi dan Reddy dalam Moekijat, 2006). Hasibuan (2011) memberikan penjelasan bahwa komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan suatu jangkauan yang sangat ditentukan oleh adanya komunikasi. Adapun penjelasan dari informan, diketahui bahwa komunikasi menjadi salah satu poin penting dalam melakukan koordinasi. Mengacu pada penjelasan yang dikemukakan oleh Sutrisno (2016) bahwa pendidikan merupakan aktivitas yang bertautan, dan meliputi berbagai unsur yang berhubungan erat antara unsur satu dengan unsur yang lain, maka komunikasi perlu dilakukan. Dengan terjalinnya komunikasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dan PKBM Kana Mapande dapat meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan terkait output lulusan yang dihasilkan PKBM Kana Mapande sebagai salah satu lembaga pendidikan non-formal. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ndraha (2003), salah satu teknik mengukur koordinasi yaitu komunikasi.

Selain itu, peneliti juga melihat bahwa komunikasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dan PKBM Kana Mapande berjalan dengan baik. Terlihat bahwa adanya kesatuan tindakan terkait penggunaan kurikulum, adanya bantuan pembiayaan yang diberikan dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 serta sistem pengelolaan pendidikan. Ini membuktikan bahwa adanya komitmen dari kedua belah pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ndraha (2003) bahwa salah satu teknik pengukuran koordinasi yaitu adanya komitmen, yang mana diartikan bahwa kesepakatan serta komitmen harus diagendakan oleh setiap pihak secara institusional. Dengan mengacu pada hal ini, diketahui bahwa komunikasi antara kedua lembaga tersebut berjalan dengan baik.

3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah pembagian tugas dan pekerjaan sehingga setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan serangkaian kegiatan yang terbatas. Jadi

pembagian kerja menyebabkan peningkatan efektivitas yang dramatis, karena tidak ada yang secara fisik mampu melakukan semua aktivitas dalam tugas yang paling kompleks dan tidak ada juga yang memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melakukan berbagai tugas (Hasibuan, 2011). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan, diketahui bahwa pembagian kerja antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dan PKBM Kana Mapande telah sesuai dengan skema yang berlaku, serta adanya koordinasi yang sering dilakukan oleh pihak PKBM Kana Mapande. Pembagian kerja yang dilakukan untuk menelaraskan tindakan serta hal yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Handyaningrat (1989), bahwa fungsi koordinasi yaitu sebagai usaha untuk menelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana.

Selain itu, diketahui juga bahwa indikator pembagian kerja dalam koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dan PKBM Kana Mapande berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya kesatuan tindakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Winardi (2012), bahwa salah satu ciri koordinasi yaitu konsep kesatuan tindakan, yang mana pimpinan harus dapat mengatur usaha dari tiap kegiatan individu sehingga adanya keserasian dalam mencapai hasil.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Koordinasi Pendidikan Masyarakat Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kana Mapande Kota Palu berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari 3 indikator yang dikemukakan oleh Hasibuan (2011) berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

1 Kesatuan Tindakan

Adanya koordinasi dari segi penggunaan kurikulum serta mekanisme pembiayaan PKBM dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu

Serta PKBM Kana Mapande memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

2 Komunikasi

Komunikasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dan PKBM Kana Mapande berjalan dengan baik. Terlihat bahwa adanya kesatuan tindakan terkait penggunaan kurikulum, adanya bantuan pembiayaan yang diberikan dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 serta sistem pengelolaan pendidikan. Ini membuktikan bahwa adanya komitmen dari kedua belah pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

3 Pembagian Kerja

Indikator pembagian kerja dalam koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dan PKBM Kana Mapande berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya kesatuan tindakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Bouckaert, G., Peters, B. G., & Verhoest, K. (2010). The Coordination of Public Sector Organization. Palgrave Macmillan. New York.
- Djumali dkk. 2014. Landasan Pendidikan. Gava Media. Yogyakarta.
- Handyaningrat, S. (2002). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. CV Haji Masagung. Jakarta.
- Handyaningrat, S. (2011). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manejemen. CV. Haji Masagung. Jakarta.
- Handoko, T. H. (2003). Manajemen. Edisi 2. BPFE. Yogyakarta.
- Hasibuan, M. S. P. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Hasibuan, M. S. P. (2006). Organisasi dan Motivasi – Dasar Peningkatan Produktivitas. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Hasibuan, M. S. P. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Bumi Askara. Jakarta.
- Hasibuan, M. S. P. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Bumi Aksara. Jakarta.

- Heldrianto, B. (2013). Penyebab Rendahnya Tingkat Pendidikan Anak Putus Sekolah Dalam Program Wajib Belajar 9 Tahun Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. <http://jurnafis.untan.ac.id>
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. UI-Press.
- Moekijat. (2006). *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Mandar Maju. Bandung.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ndraha, T. (2003). *Teori Budaya Organisasi*. Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan
- PKBM Himata. (2020). Kepala Dinas Pendidikan Buka Rapat Koordinasi Pkbm Se-Kabupaten Tangerang. <https://www.pkbmhimata.id/kepala-dinas-pendidikan-buka-rapat-koordinasi-pkbm-se-kabupaten-tangerang/>
- Statistik Pendidikan. (2021). Jumlah Siswa Putus Sekolah Di Tiap Provinsi. <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/>
- Sugandha, D. (2011). *Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi*. Intermedia. Jakarta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Alfabeta. Bandung.
- Sukarna. (2011). *Dasar - Dasar Manajemen*. Mandar Maju. Bandung.
- Sutopo, A. Hadi & Arief, A. (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Prenada Media Grup. Jakarta.
- Sutrisno, E. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Tohirin. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

- Widodo, E., & Mukhtar. (2000). *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*. Avirouz. Yogyakarta.
- Yusup, H. M. (2013). *Kerjasama Antar Instansi Pemerintah dalam Pemeliharaan Kawasan Revitalisasi Sentra Sepatu Cibaduyut*. Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Bandung.

